



2021: REFLEKSI AKHIR TAHUN KSI

Rekan-rekan yang terhormat,

Terima kasih atas kerjasama dan kemitraan Anda dalam mendukung "knowledge-to-policy" (K2P) di Indonesia pada tahun 2021. Kepemimpinan dan dialog antara pemerintah, lembaga penelitian, media, dan lembaga pendanaan dan regulator menunjukkan pentingnya ekosistem pengetahuan di Indonesia.

Dengan selesainya bantuan teknis KSI pada 2021, kami mengalihkan perhatian kami pada dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil dan pembelajaran di tahun 2022. Selain itu, kami akan mendukung rekan-rekan kami dalam dorongan terakhir untuk keberlanjutan reformasi kunci *knowledge-to-policy* (K2P).

Buletin terlampir menyoroti pencapaian dalam tata kelola dan pendanaan riset, manajemen pengetahuan dan kolaborasi, dan produksi pengetahuan beserta diskursus publik, *knowledge to policy* subnasional, dan GEDSI di tahun 2021. Buletin ini juga menguraikan rangkaian acara penutupan dan publikasi yang dijadwalkan untuk tahun 2022. Kami berharap Anda akan bergabung dengan kami dalam merayakan 10 tahun kemitraan untuk mempromosikan pengetahuan untuk kebijakan di Indonesia!

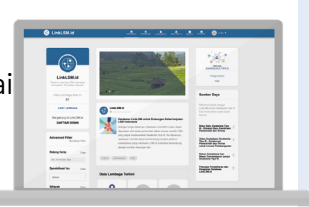
Kami menanti kerja sama dengan Anda di tahun 2022! Semoga dapat merayakan tahun baru dengan sehat! Selamat berlibur!

PENCAPAIAN

KEBERLANJUTAN

Peningkatan penggunaan Swakelola Tipe III, peraturan pengadaan yang memungkinkan pendanaan publik mengakses layanan LSM termasuk penelitian kebijakan

dan **pengembangan database LinkLSM.id** oleh konsorsium, database LSM yang berfungsi sebagai rujukan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi penyedia layanan termasuk lembaga penelitian.



Selesainya ringkasan kebijakan **Rekomendasi Penguatan Penyelenggaraan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024** dan pengembangan model dasbor PRN oleh Bappenas.

Berlanjutnya penggunaan Swakelola Tipe III dan pemanfaatan **database LinkLSM.id** oleh pemerintah secara luas dan terkoneksi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bappenas dan BRIN dapat **menggunakan dasbor PRN** dan produk-produk pengetahuan dimanfaatkan untuk rancangan background study prioritas RPJPN

Lembaga penelitian kebijakan **mendadvokasi isu-isu** yang terkait dengan **pendanaan penelitian dan tata kelola**

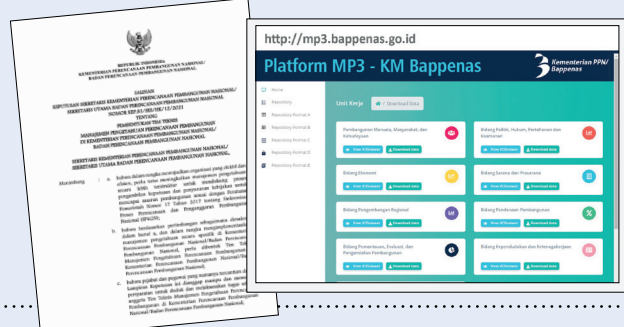
Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) untuk Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dan implementasi Indonesia Development Forum (IDF), serta pelaksanaan 22 kegiatan Road to IDF 2019-2021 dengan 41.200 peserta dan kepastian IDF 2022 dalam anggaran negara (APBN).

Platform Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3) dalam tahap uji coba, melibatkan lebih dari 80% Unit Kerja Eselon (UKE) di Bappenas. **Tim Pelaksana MP3 telah diformalkan melalui Surat Keputusan (SK) Sekretaris Menteri (No.81/2021)** dan adanya SOP integrasi *Knowledge Management*.

Bappenas **menyelenggarakan IDF secara rutin dengan dana APBN dan melibatkan multipihak** untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.



Bappenas **memanfaatkan MP3** sebagai *repository* pengetahuan **untuk mendukung analisis kebijakan pembangunan yang efektif**.



Lembaga Penelitian Kebijakan (PRI) memengaruhi kebijakan, menghasilkan penelitian kebijakan berkualitas berperspektif GEDSI, dan menjaga keberlanjutan finansial.



Panduan Fokus Pembelajaran dari Badan Standar Nasional Pendidikan **mendukung perubahan kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah**.



Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) disertai dengan pedoman untuk memantau kegiatan pelaksanaan.



Pengalokasian anggaran untuk Swakelola Tipe III di Sulawesi Selatan **mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk pembangunan**.



Situs Pusat Krisis dari Kementerian Kesehatan diperkaya dengan produk pengetahuan mengenai sistem kesehatan nasional.



Alokasi anggaran di dua desa, Sindangagung dan Karangrejo, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Gunungkidul dan Sleman mendorong masyarakat inklusif.



PP 5/2021 terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, **PP 6/2021** terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan **PP 10/2021** terkait Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kemudahan Berusaha **mendukung implementasi UU Cipta Kerja tentang kemudahan berusaha**.

Lembaga Penelitian Kebijakan **menggunakan pendekatan knowledge-to-policy (K2P)** dan memanfaatkan investasi untuk keberlanjutan finansial dalam berperan sebagai organisasi yang kuat dalam **memengaruhi kebijakan, baik secara individu maupun kolektif**.

Koalisi GEDSI termasuk Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (**ALMI**), Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (**ASWGI**), Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (**AIDRAN**), Badan Riset dan Inovasi Nasional (**BRIN**), dan Pusat Studi Hukum Konstitusi (**PSHK**) **menguat advokasi bersama**.

AIDRAN terus meningkatkan jaringannya dan **87.5% lembaga penelitian kebijakan menghasilkan penelitian sensitif GEDSI**.

Rekomendasi kebijakan AIDRAN diadopsi dalam Laporan Pendidikan Tinggi Inklusif dan Beragam di Asia dan Eropa yang dipresentasikan pada Pertemuan Asia Eropa (ASEM)

Road to IDF 2021 oleh Bappenas telah menerapkan GEDSI, and **dua dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) telah mengarusutamakan GEDSI**.

Penguatan diskursus publik tentang "ekosistem pengetahuan dan inovasi":

5 high-level webinar	7 KSIXChange	6 Seri STI Policy	3 KSI4RDI
3 Podcasts	337 Artikel pemberitaan (cetak and daring)	3,709 Partisipan di Zoom	59,707 views/plays di YouTube & Facebook Live

Rekomendasi dari rintisan studi knowledge-to-policy Subnasional memengaruhi kebijakan melalui **Draf Peraturan Gubernur untuk Penggunaan Label pada Kain Motif Sutra Asli Sulawesi Selatan, replikasi dari model riset kolaboratif diformalkan dalam SK Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan** tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelitbang Kolaborasi Sulawesi Selatan.

AIDRAN menjadi jejaring kolaborasi pengetahuan yang kuat terkait riset dan advokasi isu disabilitas.

Mitra jaringan berperan aktif **mendorong kebijakan inklusif** melalui aksi kolektif.



Kolaborasi penelitian dan pengembangan yang mengadopsi prinsip *knowledge-to-policy* (K2P) diterima sebagai masukan dan menjadi rujukan bagi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan BRIN.

CATAT TANGGALNYA!

PROGRAM KSI SERI PENUTUPAN

24 NOV
2021

High-Level Webinar 'Menuju Visi Indonesia 2045: Transformasi Ekonomi berdasarakan Pengetahuan dan Inovasi'
Mengikutsertakan para pembuat kebijakan kunci Indonesia dan Australia untuk mengikat komitmen transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang berfokus pada kolaborasi pengetahuan.

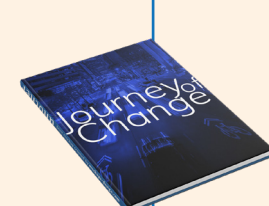
JAN
2022

Peluncuran Manajemen Pengetahuan untuk Perencanaan Pembangunan (MP3)
Menyoroti kontribusi KSI dalam memperkuat manajemen pengetahuan dan mengatasi hambatan ketersediaan dan aksesibilitas data untuk perencanaan pembangunan.

FEB
2022

Konferensi K2P (Knowledge-to-Policy)
Memfasilitasi berbagi pengalaman mengenai strategi mendukung kebijakan inklusif, dan menampilkan penelitian dari Lembaga Penelitian Kebijakan dan mitra lainnya dalam membangun lembaga penelitian yang sukses dan berpengaruh dalam penyusunan kebijakan.

Menampilkan:
Mitra KSI: Perjalanan Perubahan



MAR
2022

High-Level Webinar Agenda Kepresidenan G20
Mendiskusikan pentingnya ekosistem riset dan inovasi dalam membangun resiliensi dan daya tahan Indonesia di tengah pandemi, sekaligus mempromosikan komitmen dan potensi Indonesia dalam mempratekkan kepemimpinan global.

8 MAR
2022

Pembelajaran GEDSI di Riset dan Advokasi
Peluncuran buku sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi para peneliti, aktivis, dan pembuat kebijakan untuk menggunakan perspektif GEDSI dalam penelitian, advokasi, dan pembuatan kebijakan.



APR
2022

Acara Puncak: Merayakan 10 Tahun KSI
Merayakan pencapaian bersama atas kemitraan yang telah terbangun selama 10 tahun di sektor pengetahuan.

